

## ANALISIS SALDO PRIMER POSITIF PADA TAHUN 2023 SEBAGAI INDIKATOR APBN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Moch Fahrudin <sup>a,1</sup>

<sup>a</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Indonesia

<sup>1</sup> [fahrudin73@gmail.com](mailto:fahrudin73@gmail.com)

\*email korespondensi : [fahrudin73@gmail.com](mailto:fahrudin73@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-06-01

Diterima

2024-06-01

Dipublikasikan

2024-07-04

#### Kata Kunci:

Saldo Primer; Undang-Undang APBN,

Pertumbuhan Ekonomi;

Kesejahteraan; Pembayaran Bunga

Utang

### ABSTRAK

*The 2023 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) shows a positive figure of 92.2 trillion. This has been anticipated since 2012, and it has always been in a negative condition. This is an indicator of the improving health of the APBN, as a manifestation that leads to better economic conditions and the welfare of Indonesian society in general. The primary balance is state income minus state expenditure without debt interest payments. In determining the initial assumptions of the 2023 APBN Law, the primary balance is in negative condition. And, until the end of 2023, it shows a positive balance how This condition can show that the economy is developing with greater income, which will impact people's welfare.*



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat capaian penting dengan adanya saldo primer yang positif. Saldo primer, yang merupakan selisih antara pendapatan negara dikurangi belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang, menjadi salah satu indikator kunci yang sering digunakan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara. Ketika saldo primer positif, ini menandakan bahwa pemerintah mampu mengelola pengeluaran publik secara efektif tanpa harus bergantung pada pembiayaan utang untuk menutupi belanja operasional.<sup>1</sup>

Saldo primer yang positif pada tahun 2023 merupakan hasil dari upaya konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, terutama setelah beberapa tahun terakhir mengalami tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat, pendapatan negara dari sektor pajak dan penerimaan lainnya meningkat, sementara belanja negara tetap terkendali. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan fiskal yang lebih baik, di mana pemerintah berhasil menyeimbangkan antara kebutuhan belanja publik dan kemampuan pendapatan.

Capaian saldo primer yang positif juga memiliki implikasi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, saldo primer yang positif dapat memberikan sinyal positif kepada investor dan lembaga keuangan internasional mengenai komitmen

<sup>1</sup> Redaksi KPPN, 'Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional', 2024 <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/berita-terbaru/3595-kinerja-apbn-2023-luar-biasa,-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional.html>> [accessed 9 August 2024].

pemerintah terhadap stabilitas fiskal. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong aliran investasi ke dalam negeri, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, dengan pengelolaan utang yang lebih baik, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya pada program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks tersebut, analisis saldo primer positif pada tahun 2023 tidak hanya penting sebagai indikator keberhasilan fiskal, tetapi juga sebagai tolok ukur keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis ini, kita dapat memahami sejauh mana kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah berhasil menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia adalah instrumen penting untuk mengelola keuangan negara, mendanai layanan publik, dan mendorong pembangunan ekonomi. Saldo primer, yang didefinisikan sebagai pendapatan negara dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang, berfungsi sebagai indikator kunci dari kesehatan fiskal dan keberlanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan terkait defisit fiskal dan peningkatan utang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas fiskal dan prospek ekonomi negara.

Namun, APBN untuk tahun 2023 menandai tonggak penting dengan saldo primer positif sebesar 92,2 triliun rupiah. Peningkatan yang tidak terduga ini telah menimbulkan optimisme mengenai prospek fiskal Indonesia dan potensinya. Makalah ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap saldo primer positif pada tahun 2023 dan menganalisis implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. Dengan mengeksplorasi dinamika pengelolaan fiskal, mobilisasi pendapatan, dan prioritas pengeluaran, studi ini bertujuan memberikan wawasan tentang peran saldo primer dalam membentuk lintasan ekonomi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum terkait analisis Saldo Primer Positif pada tahun 2023 sebagai indikator APBN dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, seperti Undang-Undang APBN 2023 dan peraturan pemerintah lainnya, untuk menganalisis bagaimana kebijakan anggaran tersebut mempengaruhi keseimbangan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat melibatkan pendekatan empiris dengan menganalisis data kuantitatif terkait Saldo Primer dan indikator makroekonomi lainnya, serta wawancara dengan pakar ekonomi dan pejabat pemerintah untuk mendapatkan perspektif praktis terkait implementasi kebijakan tersebut. Kombinasi metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas Saldo Primer Positif sebagai indikator dalam kebijakan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional.<sup>3</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Konteks Sejarah Pengelolaan Fiskal Indonesia

Untuk memahami pentingnya saldo primer positif pada tahun 2023, penting untuk mengkaji konteks sejarah pengelolaan fiskal Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam kinerja fiskalnya, ditandai dengan periode surplus dan

---

<sup>2</sup> Asian Development Bank, 'Perekonomian Indonesia akan Tumbuh Kembali pada 2021: ADB' (Asian Development Bank, 2021) <<https://www.adb.org/id/news/indonesia-economy-return-growth-2021-adb>> [accessed 9 August 2024].

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

defisit fiskal. Krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an secara serius memengaruhi ekonomi Indonesia, menyebabkan periode ketidakstabilan ekonomi yang panjang dan tantangan fiskal.<sup>4</sup>

Sebagai respons terhadap krisis tersebut, Indonesia memulai serangkaian reformasi ekonomi yang bertujuan untuk mengembalikan stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan fiskal. Reformasi ini meliputi langkah-langkah konsolidasi fiskal, penyesuaian struktural, dan reformasi sektor keuangan. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam memperkuat posisi fiskalnya, mengurangi defisit, dan meningkatkan praktik pengelolaan utang.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, Indonesia terus menghadapi tantangan yang persisten dalam mencapai keberlanjutan fiskal, termasuk mobilisasi pendapatan yang rendah, pengeluaran publik yang tidak efisien, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 lebih lanjut memperburuk tantangan ini, menyoroti perlunya pengelolaan fiskal yang proaktif dan reformasi kebijakan.<sup>6</sup>

### 3.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Saldo Primer Positif

Pencapaian saldo primer positif pada tahun 2023 dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk manajemen fiskal yang hati-hati, mobilisasi pendapatan yang ditingkatkan, dan kondisi ekonomi yang menguntungkan.<sup>7</sup>

#### a. Manajemen Fiskal yang Hati-Hati

Komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal dan pengendalian pengeluaran memainkan peran penting dalam pencapaian saldo primer positif pada tahun 2023. Implementasi langkah-langkah konsolidasi fiskal, termasuk rasionalisasi pengeluaran, reformasi subsidi, dan restrukturisasi utang, membantu mengendalikan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kinerja anggaran.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik berkontribusi pada alokasi sumber daya yang lebih efektif dan pengurangan pengeluaran yang boros. Penerapan anggaran berbasis kinerja, inisiatif transparansi fiskal, dan mekanisme pengawasan yang ditingkatkan membantu memperkuat tata kelola fiskal dan memastikan penggunaan dana publik yang efektif.<sup>8</sup>

#### b. Mobilisasi Pendapatan yang Ditingkatkan

---

<sup>4</sup> 'Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia | Kajian Ekonomi Dan Keuangan' <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/186>> [accessed 9 August 2024].

<sup>5</sup> Husriah Husriah, 'PENGARUH DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Economix*, 8.2 (2021) <<https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/18946>> [accessed 9 August 2024].

<sup>6</sup> Rossyta Asril and Hesi Eka Puteri, 'Determinan Kemiskinan Di Indonesia Menurut Perspektif Pembangunan Islam Periode 2007-2021', *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9.1 (2024), pp. 01-15, doi:10.30631/ijoieb.v9i1.2041.

<sup>7</sup> Ferdinand Anjas Karo Karo and Yusnida Yusnida, 'Causality Analysis Between Unemployment, Poverty, and Economic Growth in the Southern Sumatra Region', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12.1 (2024), doi:10.37676/ekombis.v12i1.5062.

<sup>8</sup> OECD, *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*, OECD Economic Surveys: Indonesia (OECD, 2021), doi:10.1787/fd7e6249-en.

Upaya mobilisasi pendapatan, termasuk reformasi pajak, peningkatan kepatuhan pajak, dan langkah-langkah anti-korupsi, telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah dan pencapaian saldo primer positif.

Komitemen pemerintah untuk memperluas basis pajak, menyederhanakan prosedur pajak, dan memperkuat administrasi pajak telah membantu meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak. Pengenalan sistem pengajuan pajak elektronik, nomor identifikasi wajib pajak, dan teknik audit berbasis risiko telah meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi, memfasilitasi upaya mobilisasi pendapatan.<sup>9</sup>

c. Kondisi Ekonomi yang Menguntungkan

Saldo primer positif pada tahun 2023 juga didukung oleh kondisi ekonomi yang menguntungkan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang stabil, dan lingkungan eksternal yang menguntungkan.

Kinerja ekonomi Indonesia yang kuat, didorong oleh permintaan domestik yang tangguh, peningkatan investasi, dan harga komoditas yang menguntungkan, telah meningkatkan arus pendapatan pemerintah dan kapasitas fiskal. Selain itu, fondasi makroekonomi yang stabil, termasuk kebijakan moneter yang bijaksana dan manajemen fiskal yang hati-hati, telah meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### 3.3 Implikasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian saldo primer positif pada tahun 2023 memiliki implikasi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Saldo primer positif menunjukkan bahwa pemerintah menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran non-bunga, menandakan keberlanjutan fiskal dan stabilitas makroekonomi. Hal ini, pada gilirannya, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk investasi sektor swasta, merangsang aktivitas ekonomi, dan mendukung prospek pertumbuhan jangka panjang.

a. Peningkatan Ruang Fiskal untuk Investasi

Saldo primer positif memberikan pemerintah lebih banyak ruang fiskal untuk berinvestasi dalam infrastruktur kritis, pengembangan modal manusia, dan program perlindungan sosial. Peningkatan investasi publik dalam infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi, dapat meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing, membentuk dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, investasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial dapat meningkatkan hasil modal manusia, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan mendorong pertumbuhan inklusif. Dengan memprioritaskan investasi dalam sektor-sektor kunci, pemerintah dapat mendukung pengembangan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan adil, yang menguntungkan semua segmen masyarakat.

b. Peningkatan Kepercayaan Investor

Pencapaian saldo primer positif meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia, menandakan komitmen pemerintah terhadap

---

<sup>9</sup> KPPN.

disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi. Peningkatan kredibilitas fiskal mengurangi ketidakpastian investor, menurunkan biaya pinjaman, dan merangsang investasi sektor swasta, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, saldo primer positif memperkuat ketahanan Indonesia terhadap guncangan eksternal dan kerentanan ekonomi, mengurangi kemungkinan krisis fiskal dan ketidakstabilan keuangan. Hal ini, pada gilirannya, menarik investasi langsung asing, mempromosikan transfer teknologi, dan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung prospek pertumbuhan jangka panjang.

c. Efektivitas Kebijakan Fiskal

Saldo primer positif meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal sebagai alat untuk stabilisasi makroekonomi dan manajemen kontra-siklik. Dengan buffer fiskal yang cukup dan ruang kebijakan, pemerintah dapat merespons lebih efektif terhadap penurunan ekonomi, menerapkan langkah-langkah kontra-siklik, dan mendukung permintaan agregat, mitigasi dampak buruk dari guncangan eksternal dan fluktuasi siklus.

Selain itu, saldo primer positif mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan utang dan pinjaman eksternal, mengurangi kerentanan fiskal dan mempertahankan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah hingga panjang. Dengan menjaga sikap fiskal yang hati-hati dan memastikan keberlanjutan utang, Indonesia dapat menciptakan lingkungan makro ekonomi yang stabil yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

### 3.4 Implikasi untuk Kesejahteraan

Pencapaian saldo primer positif pada tahun 2023 memiliki implikasi langsung bagi kesejahteraan dan kesejahteraan warga Indonesia. Saldo primer positif memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk mengatasi kebutuhan sosial, meningkatkan pembangunan manusia, dan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.<sup>10</sup>

a. Investasi dalam Pengembangan Modal Manusia

Pendapatan pemerintah yang meningkat akibat saldo primer positif dapat dialokasikan untuk investasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan program perlindungan sosial, meningkatkan akses ke layanan penting dan hasil modal manusia. Investasi dalam pendidikan, seperti memperluas akses ke pendidikan berkualitas, meningkatkan pelatihan guru, dan meningkatkan fasilitas pendidikan, dapat meningkatkan pembentukan modal manusia, mendorong pembelajaran sepanjang hayat, dan meningkatkan produktivitas dan keterampilan kerja.

Demikian pula, investasi dalam perawatan kesehatan, termasuk memperluas akses ke layanan kesehatan, memperkuat infrastruktur kesehatan, dan meningkatkan hasil kesehatan, dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi morbiditas dan mortalitas, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, program perlindungan sosial, seperti transfer tunai, subsidi pangan, dan skema asuransi sosial,

---

<sup>10</sup> 'Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian' <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2000/11/02/111597-analisis-hubungan-pengeluaran-pemerintah-dan-produk-domestik-bruto-dengan-menggunakan-pendekatan-granger-causality-dan-vector-autoregression>> [accessed 9 August 2024].

dapat memberikan jaring pengaman bagi populasi rentan, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan mempromosikan kohesi sosial dan inklusivitas.

b. Pembebasan Kemiskinan dan Inklusi Sosial

Saldo primer positif memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah pembebasan kemiskinan yang ditargetkan dan program inklusi sosial, mengatasi kebutuhan kelompok yang terpinggirkan dan rentan. Dengan mengalokasikan sumber daya kepada kelompok paling miskin dan paling rentan dalam masyarakat, pemerintah dapat mengurangi kemiskinan, mempersempit disparitas pendapatan, dan mempromosikan mobilitas sosial dan inklusi.

Selain itu, program perlindungan sosial, seperti transfer tunai yang bersyarat, suplementasi nutrisi, dan akses ke layanan dasar, dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, mengurangi eksklusi sosial, dan mempromosikan kohesi sosial. Dengan berinvestasi dalam infrastruktur sosial dan pembangunan manusia, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana semua warga memiliki akses ke peluang dan sumber daya untuk peningkatan diri dan mobilitas ke atas.

c. Pembangunan Regional dan Inklusi Ekonomi

Pencapaian saldo primer positif memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memprioritaskan investasi dalam pembangunan regional dan inklusi ekonomi, mengatasi disparitas regional dan mendorong pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Dengan berinvestasi dalam infrastruktur, konektivitas, dan diversifikasi ekonomi di daerah tertinggal, pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup, mengurangi ketidaksetaraan regional dan mempromosikan koherensi wilayah.

Selain itu, intervensi yang ditargetkan, seperti zona ekonomi khusus, program pembangunan pedesaan, dan inisiatif pembiayaan mikro, dapat memberdayakan masyarakat lokal, mempromosikan kewirausahaan, dan membuka potensi ekonomi daerah yang terpinggirkan. Dengan mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan bakat, sumber daya, dan aspirasi semua warganya, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perjuangan menuju kemakmuran dan kemajuan.

### 3.5 Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjaga lintasan positif saldo primer dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan, beberapa rekomendasi kebijakan diajukan<sup>11</sup>

a. Memperkuat Disiplin Fiskal dan Manajemen Pengeluaran

Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan publik untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dan tujuan keberlanjutan fiskal.

---

<sup>11</sup> Nadia Esa Putri, Muhammad Fachril Husain Jeddawi, and Fadilah Risqy Utami, 'ANALISIS HUBUNGAN DEFISIT KESEIMBANGAN PRIMER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3.2 (2021), pp. 69–77, doi:10.61076/jpp.v3i2.2067.

Melaksanakan anggaran berbasis kinerja, inisiatif transparansi fiskal, dan tinjauan pengeluaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dan meningkatkan kualitas layanan publik.

b. Meningkatkan Mobilisasi Pendapatan dan Reformasi Pajak

Memperluas basis pajak, menyederhanakan prosedur pajak, dan memperkuat administrasi pajak untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dan mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak.

Melaksanakan langkah-langkah yang ditargetkan untuk meningkatkan kepatuhan, seperti sistem pengajuan pajak elektronik, nomor identifikasi wajib pajak, dan teknik audit berbasis risiko, untuk memastikan pajak yang adil dan merata.

c. Mendorong Partisipasi dan Investasi Sektor Swasta

Membangun lingkungan yang mendukung partisipasi dan investasi sektor swasta dengan menerapkan kebijakan yang ramah bisnis, memperbaiki kerangka kerja regulasi, dan mengurangi hambatan birokrasi.

Berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur, mempromosikan kemitraan publik-swasta, dan memfasilitasi akses ke pembiayaan dan kredit untuk mendukung pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor swasta dan diversifikasi ekonomi.

d. Menginvestasikan dalam Pengembangan Modal Manusia dan Perlindungan Sosial

Meningkatkan investasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan program perlindungan sosial untuk meningkatkan akses ke layanan penting, meningkatkan hasil modal manusia, dan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas program perlindungan sosial, seperti transfer tunai, subsidi pangan, dan skema asuransi sosial, untuk memberikan jaring pengaman bagi populasi rentan dan mempromosikan inklusi sosial dan ketahanan.

e. Mendorong Pembangunan Regional dan Inklusi Ekonomi

Memprioritaskan investasi dalam pembangunan regional, infrastruktur, dan konektivitas untuk merangsang aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi disparitas regional.

Melaksanakan intervensi yang ditargetkan, seperti zona ekonomi khusus, program pembangunan pedesaan, dan inisiatif pembiayaan mikro, untuk memberdayakan masyarakat lokal, mempromosikan kewirausahaan, dan membuka potensi ekonomi wilayah yang terpinggirkan.

#### 4. KESIMPULAN

Pencapaian saldo primer positif pada tahun 2023 merupakan tonggak penting bagi pengelolaan fiskal Indonesia, mencerminkan prospek ekonomi yang membaik dan peningkatan kesejahteraan. Saldo primer positif menandakan manajemen fiskal yang hati-hati, mobilisasi pendapatan yang ditingkatkan, dan kondisi ekonomi yang menguntungkan, memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan investasi dalam sektor-sektor kunci, mendorong partisipasi sektor swasta, dan melaksanakan kebijakan fiskal yang bijaksana, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonominya dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan

untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung dalam pengelolaan fiskal, mobilisasi pendapatan, dan prioritas pengeluaran untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dibagikan secara adil dan mencapai semua segmen masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Asril, Rossyta, and Hesi Eka Puteri, 'Determinan Kemiskinan Di Indonesia Menurut Perspektif Pembangunan Islam Periode 2007-2021', *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9.1 (2024), pp. 01–15, doi:10.30631/ijoeib.v9i1.2041

Azwar, Saifuddin, *Metode penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

'Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian' <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2000/11/02/111597-analisis-hubungan-pengeluaran-pemerintah-dan-produk-domestik-bruto-dengan-menggunakan-pendekatan-granger-causality-dan-vector-autoregression>> [accessed 9 August 2024]

Bank, Asian Development, 'Perekonomian Indonesia akan Tumbuh Kembali pada 2021: ADB' (Asian Development Bank, 2021) <<https://www.adb.org/id/news/indonesia-economy-return-growth-2021-adb>> [accessed 9 August 2024]

Husriah, Husriah, 'PENGARUH DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Economix*, 8.2 (2021) <<https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/18946>> [accessed 9 August 2024]

Karo Karo, Ferdinand Anjas, and Yusnida Yusnida, 'Causality Analysis Between Unemployment, Poverty, and Economic Growth in the Southern Sumatra Region', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12.1 (2024), doi:10.37676/ekombis.v12i1.5062

KPPN, Redaksi, 'Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional', 2024 <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/berita-terbaru/3595-kinerja-apbn-2023-luar-biasa,-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional.html>> [accessed 9 August 2024]

OECD, *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*, OECD Economic Surveys: Indonesia (OECD, 2021), doi:10.1787/fd7e6249-en

'Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia | Kajian Ekonomi Dan Keuangan' <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/186>> [accessed 9 August 2024]

Putri, Nadia Esa, Muhammad Fachril Husain Jeddawi, and Fadilah Risqy Utami, 'ANALISIS HUBUNGAN DEFISIT KESEIMBANGAN PRIMER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3.2 (2021), pp. 69–77, doi:10.61076/jpp.v3i2.2067